



## Dinamika politik dalam perkembangan tasawuf

Muhammad Ikhya Ulumuddin,<sup>1\*</sup> Muhammad Nur Hayyid,<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ma'arif Lampung, <sup>2</sup>Dosen Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal

<sup>1</sup>*muh.ikhyaulumuddin@gmail.com*, <sup>2</sup>*gushayid80@gmail.com*

Received : 17/07/2025

Revised:02/10/2025

Approved:0610/2025

### Abstract

This study explores the complex dynamics between Sufism and politics in the history of Islamic civilization, tracing how Sufi practices and thought developed alongside changes in the socio-political context. Specifically, this study aims to analyze the influence of post-Khulafa Rasyidin political turmoil on the emergence of Sufism, as well as to explain how its teachings were interpreted flexibly to legitimize or oppose power. Using a qualitative approach through literature study, the findings show that the practice of *zuhud* (asceticism) emerged as a moral critique of the materialism of the rulers. During the Abbasid period, Sufism underwent doctrinal and institutional development through the *tarekat*. Figures such as Hasan al-Bashri, Al-Hallaj, and Al-Ghazali demonstrated the unique dual role of Sufism as both a critic and a legitimator. In the medieval to modern periods, Sufi orders became significant socio-political institutions that functioned as mediators, opinion makers, and bases of resistance against injustice. In Indonesia, Sufi orders have proven to play a strategic role in resistance against colonialism, community education, and contemporary socio-political dynamics, demonstrating their continued relevance as moral and social forces.

**Keywords:** Dynamic, Politic, and Tasawuf

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hubungan kompleks antara tasawuf dan politik dalam sejarah peradaban Islam, menelusuri bagaimana praktik dan pemikiran sufistik berkembang seiring perubahan konteks sosial-politik. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pergolakan politik pasca-Khulafa Rasyidin terhadap kemunculan tasawuf, serta menjelaskan bagaimana ajarannya diinterpretasikan secara fleksibel untuk melegitimasi atau menentang kekuasaan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, temuan menunjukkan bahwa praktik *zuhud* (asketisme) muncul sebagai kritik moral terhadap materialisme penguasa. Pada masa Abbasiyah, tasawuf mengalami perkembangan doktrinal dan kelembagaan melalui tarekat. Tokoh-tokoh seperti Hasan al-Bashri, Al-Hallaj, dan Al-Ghazali menunjukkan peran ganda unik tasawuf sebagai kritik sekaligus legitimator. Di periode pertengahan hingga modern, tarekat menjadi institusi sosial-politik signifikan yang berfungsi sebagai mediator, penggerak opini, dan basis perlawanan terhadap ketidakadilan. Di Indonesia, tarekat terbukti memainkan peran



strategis dalam perlawanan terhadap penjajahan, pendidikan masyarakat, dan dinamika sosial-politik kontemporer, menunjukkan relevansinya yang berkelanjutan sebagai kekuatan moral dan sosial.

**Kata Kunci:** Dinamika, Politik, dan Tasawuf

## **Pendahuluan**

Historis perkembangan tasawuf dan konteks politik Islam yang melingkupinya merupakan narasi yang kompleks dan dinamis, hal ini terjalin sejak awal kemunculan Islam. Pada periode formatif, terutama pasca wafatnya *Khulafa Rasyidin*, muncul kecenderungan di kalangan umat Islam untuk menjauhi intrik politik yang dianggap duniawi dan ingin berfokus pada aspek spiritualitas serta moralitas individual. (Riyadi, 2014)

Perkembangan tasawuf juga menghadapi tantangan dan kritik, baik dari kalangan ulama fiqih yang menilai adanya praktik-praktik yang dianggap menyimpang, maupun dari perkembangan zaman yang menuntut perubahan dalam pendekatan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf, baik dari segi ajarannya, tokoh-tokohnya, serta pengaruhnya dalam berbagai wilayah peradaban Islam. (Putra, 2017)

Seiring berjalannya waktu, terutama pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terjadi perkembangan signifikan dalam pemikiran dan praktik tasawuf. Gaya hidup mewah dan persaingan politik di kalangan elit penguasa memicu reaksi spiritual yang lebih terorganisir. Tokoh-tokoh sufi mulai merumuskan ajaran-ajaran yang lebih sistematis dan terlembagakan dalam bentuk tarekat, pengajarannya mengenai konsep-konsep seperti *ma'rifah* dan pentingnya seorang guru spiritual atau biasa disebut *mursyid*. (Sitika et al., 2024)

Dalam menganalisis interaksi ini, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang memandang tasawuf memiliki “fleksibilitas politik” yang inheren. Artinya, ajaran tasawuf dapat diinterpretasikan untuk menghasilkan dua respons yang berlawanan terhadap kekuasaan: (1) legitimasi, di mana tasawuf mendukung dan menstabilkan rezim yang berkuasa melalui nasihat spiritual dan pembinaan moral; dan (2) resistensi, di mana tasawuf menjadi basis ideologis dan organisasional untuk menentang ketidakadilan dan kezaliman.

Dalam konteks politik, interaksi antara tasawuf dan kekuasaan memiliki berbagai dimensi. Di satu sisi, beberapa tokoh sufi dan tarekat memiliki hubungan dekat dengan penguasa, memberikan legitimasi spiritual atau bahkan menjadi penasihat. Di sisi lain, ajaran tasawuf yang menekankan keadilan, kesederhanaan, dan kritik terhadap materialisme juga dapat menjadi sumber perlawanan moral atau bahkan politik terhadap rezim yang dianggap korup atau zalim.

Di satu sisi, beberapa tokoh sufi dan tarekat memiliki hubungan dekat dengan penguasa, memberikan legitimasi spiritual atau bahkan menjadi penasihat. Di sisi lain, ajaran tasawwuf yang menekankan keadilan, kesederhanaan, dan kritik terhadap materialisme juga dapat menjadi sumber perlawanan moral atau bahkan politik terhadap rezim yang dianggap korup atau zalim. Sebagai entitas sosial, tarekat tidak dapat menghindarkan diri dari problem sosial-politik, karena penguatan kelembagaannya berpotensi menjadi wadah aspirasi masyarakat untuk melawan ketidakadilan. (Riyadi, 2014, p. 381)

Penelitian mengenai dinamika politik dalam perkembangan tasawuf telah dilakukan beberapa peneliti yang lain dengan cakupan dan wilayah yang berbeda. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Junaedi Sitika, dkk yang berjudul “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Tasawuf dalam Islam”. Pada penelitian tersebut menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tasawuf mulai ada abad pertama Islam hingga saat ini. (Sitika et al., 2024). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab Syakhrani dan Nournaina yang berjudul “Sejarah Munculnya Tasawuf”, hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa tasawuf tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran islam saja, melainkan juga dipengaruhi oleh ajaran di luar Islam. (Syakhrani & Nournaina, 2023)

Celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh studi ini adalah analisis kritis terhadap bagaimana fleksibilitas doktrin dan institusi tasawuf memungkinkannya memainkan peran ganda sebagai penopang sekaligus pengkritik kekuasaan di sepanjang sejarah Islam. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini merumuskan beberapa masalah, yaitu Bagaimana konteks politik pada masa awal Islam memengaruhi kemunculan dan perkembangan awal tasawuf? Dan bagaimana ajaran-ajaran tasawuf (misalnya, konsep zuhud, keadilan, kepatuhan) digunakan atau diinterpretasikan dalam konteks politik?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk menganalisis pengaruh konteks politik pada masa awal Islam terhadap kemunculan dan perkembangan awal tasawuf sebagai respons spiritual dan etis. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran inti tasawuf seperti zuhud, keadilan, dan kepatuhan secara fleksibel diinterpretasikan untuk melegitimasi sekaligus mengkritik kekuasaan politik di berbagai periode sejarah, termasuk dalam konteks Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan atau *library research*, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap dinamika politik dalam perkembangan tasawuf dengan merujuk berbagai sumber dengan literatur yang sesuai, baik dari kitab klasik, buku, artikel jurnal, maupun website. (Ulumuddin et al., 2020) Proses

pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Kriteria seleksi literatur meliputi: (1) karya-karya klasik tentang sejarah tasawuf dan tokoh-tokohnya, (2) artikel jurnal akademik kontemporer yang membahas persinggungan antara tasawuf, politik, dan perubahan sosial, serta (3) studi kasus spesifik mengenai peran tarekat di berbagai wilayah, khususnya Indonesia. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi dan menginterpretasikan pola-pola interaksi antara tasawuf dan kekuasaan (legitimasi, oposisi, mediasi, dan resistensi) yang muncul dalam berbagai periode sejarah, untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

## Hasil dan Pembahasan

Kemunculan dan praktik *sufi* di zaman Nabi dan Sahabat (ahlus shuffa, dan sahabat lainnya):

### 1. Periode Awal Perkembangan Tasawuf (Abad 7-8 M / 1-2 H)

Periode awal Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan masa *Khulafa Rasyidin*, ditandai dengan ekspansi wilayah yang pesat dan pembentukan struktur kekuasaan politik yang baru. Namun, seiring dengan perluasan kekuasaan dan akumulasi kekayaan, muncul pula dinamika politik yang diwarnai oleh perselisihan internal, perebutan kekuasaan, dan potensi penyimpangan dari nilai-nilai Islam yang mendasar.

Dalam konteks inilah, mulai muncul kecenderungan di kalangan sebagian umat Islam untuk mengambil jarak dari gemerlap duniawi dan fokus pada dimensi spiritualitas serta moralitas individual. Fenomena ini diwujudkan dalam praktik *zuhud* (asketisme atau pelepasan diri dari keterikatan dunia) dan ibadah yang mendalam (Zebua et al., 2025). Mereka melihat bahwa fokus pada kekayaan dan kekuasaan dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama hidup seorang Muslim, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kecenderungan *zuhud* ini tidak selalu merupakan penolakan langsung terhadap kekuasaan politik, tetapi lebih merupakan respons etis dan spiritual terhadap realitas sosial dan politik pada masa itu. Para *zahid* (sebutan bagi pelaku *zuhud*) menekankan kesederhanaan, kerendahan hati, dan penolakan terhadap kemewahan duniawi sebagai cara untuk memurnikan jiwa dan menghindari jebakan kekuasaan yang koruptif. Kondisi politik yang tidak stabil dan potensi ketidakadilan menjadi salah satu pendorong bagi munculnya orientasi spiritual yang lebih mendalam ini.

Pada fase awal ini, belum terdapat aliran tasawuf yang terorganisir secara formal seperti pada periode selanjutnya. Namun, muncul tokoh-tokoh individual yang dikenal karena kesalehan, praktik *zuhud* yang kuat, dan pandangan-pandangan moral yang

berpengaruh. Seorang tokoh yang sering dikaitkan dengan kecenderungan awal ini adalah Hasan al-Bashri (w. 728 M), seorang ulama dan tokoh terkemuka di Bashrah yang dikenal karena khotbah-khotbahnya yang penuh dengan renungan tentang kefanaan dunia dan pentingnya pertanggungjawaban di akhirat. Kritik moralnya sering kali secara implisit menyoroti gaya hidup mewah dan potensi penyimpangan para penguasa. Meskipun tidak terlibat langsung dalam politik praktis, pengaruh moralnya sangat besar, menunjukkan bagaimana tasawuf pada fase awalnya berfungsi sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mengawasi kekuasaan dari luar. (Rahman, 2020)

## 2. Periode Pembentukan Aliran-Aliran Tasawuf (Abad 9-12 M / 3-6 H)

Periode abad ke-9 hingga ke-12 M menyaksikan transformasi signifikan dalam lanskap politik dunia Islam, terutama di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Setelah mencapai puncak kejayaannya pada awal-awal masa kekhalifahan, Abbasiyah mulai mengalami kemunduran dan fragmentasi kekuasaan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap dinamika ini adalah: meluasnya wilayah kekhalifahan, konflik internal dan perebutan kekuasaan, munculnya dinasti-dinasti lokal, dan perubahan sosial dan ekonomi.

Tasawuf pada periode ini juga mulai memiliki ciri psikomoral yang lebih menekankan pada akhlak dan tingkah laku moral. Ilmu tasawuf pada masa ini terbagi menjadi tiga bagian: Ilmu Jiwa, Ilmu Akhlak, dan Ilmu Metafisika. Perkembangan ini begitu pesat sehingga tasawuf seakan menjadi sebuah mazhab tersendiri, bahkan dianggap oleh sebagian orang sebagai agama yang terpisah. Pada abad ini, dua aliran tasawuf utama muncul, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf semi falsafi. Tasawuf sunni berfokus pada praktek-praktek yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sedangkan tasawuf semi falsafi memasukkan elemen-elemen filsafat dalam ajarannya. (Sitika et al., 2024)

Dalam konteks fragmentasi kekuasaan, aliran-aliran tasawuf mulai tumbuh dan berkembang dengan karakteristik yang lebih jelas dan terorganisir. Kehilangan stabilitas politik terpusat dan munculnya berbagai pusat kekuasaan regional menciptakan lingkungan yang beragam bagi perkembangan pemikiran dan praktik sufistik.

Periode ini menjadi saksi kemunculan berbagai tokoh sufi berpengaruh yang meletakkan dasar bagi aliran-aliran tasawuf yang berbeda. Beberapa tokoh dan kecenderungan penting meliputi:

- 1) Al-Hallaj (w. 922 M), ungkapan-ungkapan teosofisnya yang kontroversial seperti "Ana al-Haqq" (Akulah Kebenaran/Allah), Al-Hallaj menarik banyak pengikut tetapi

juga menimbulkan oposisi dari kalangan ortodoks dan penguasa Abbasiyah, yang akhirnya berujung pada eksekusinya. Kasusnya menyoroti potensi ketegangan antara pengalaman mistis yang mendalam dan otoritas politik-keagamaan.(Rahman, 2020)

- 2) Abu Yazid al-Bustami (w. sekitar 874 M), dikenal dengan ungkapan-ungkapan ekstatisnya (shatahat) yang menunjukkan pengalaman persatuan dengan Tuhan. Pemikirannya mempengaruhi perkembangan tasawuf spekulatif.(Rahman, 2020)
- 3) Al-Ghazali (wafat 1111 M), merupakan figur yang juga berkontribusi untuk merekonsiliasi antara syariat (hukum Islam eksternal) dan hakikat (dimensi mistis atau esoteris Islam).(Rahman, 2020)

Periode abad ke-9 hingga ke-12 M merupakan masa krusial bagi perkembangan tasawuf, ditandai dengan fragmentasi kekuasaan Abbasiyah dan munculnya berbagai aliran pemikiran dan praktik sufistik. Interaksi antara para sufi dan kekuatan politik lokal sangat beragam, mulai dari dukungan hingga oposisi. Meskipun keterlibatan sufi dalam gerakan sosial atau politik belum dominan, kasusnya menyoroti potensi ketegangan inheren antara otoritas spiritual mistik yang bersifat personal dengan otoritas politik-keagamaan formal yang dipegang negara.

### 3. Tasawuf dan Kekuasaan pada Periode Pertengahan dan Akhir (Abad 13-18 M)

Periode ini ditandai dengan menguatnya peran tarekat-tarekat sufi (ordo-ordo mistik Islam) sebagai kekuatan sosial dan politik yang signifikan di berbagai wilayah dunia Islam. Tarekat-tarekat seperti Qadiriyyah, Rifa'iyah, Syadziliyyah, Naqsyabandiyah, dan Bektashiyah menjadi sangat berpengaruh dan memiliki jaringan pengikut yang luas, melintasi batas-batas etnis dan geografis.(Sitika et al., 2024) Dalam konteks politik, tarekat-tarekat ini sering kali memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi spiritual bagi kekuasaan dinasti-dinasti Islam yang muncul pada periode ini, baik yang berbasis di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, anak benua India, maupun Afrika.(Rahman, 2020)

Pengaruh politik para *syekh* sufi (*mursyid*) dan jaringan tarekat melampaui sekadar memberikan legitimasi. Mereka sering kali memainkan peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial, di antara lain:

- a. Mediator dan Penasihat: Para *syekh/mursyid* yang dihormati dapat bertindak sebagai mediator dalam konflik politik atau sosial, menggunakan otoritas spiritual mereka untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Mereka juga sering memberikan nasihat kepada penguasa dalam masalah-masalah pemerintahan, meskipun tidak selalu secara formal.

- b. Penggerak Opini Publik: Jaringan luas pengikut tarekat memungkinkan para syekh untuk mempengaruhi opini publik. Khotbah-khotbah, ajaran-ajaran, dan tindakan mereka dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap penguasa, kebijakan, atau isu-isu sosial politik lainnya.
- c. Pengelola Wakaf dan Lembaga Sosial: Tarekat-tarekat sering kali mengelola tanah wakaf dan lembaga-lembaga sosial seperti madrasah, rumah sakit, dan tempat penampungan. Kontrol atas sumber daya ini memberikan mereka pengaruh ekonomi dan sosial yang signifikan, yang secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi politik lokal.
- d. Pembentukan Identitas dan Solidaritas: Tarekat dapat menjadi basis pembentukan identitas komunal dan solidaritas di antara para pengikutnya, yang dapat dimobilisasi untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk dukungan politik atau aksi sosial.
- e. Potensi Konflik dengan Kekuasaan: Meskipun sering memberikan legitimasi, tarekat juga berpotensi menimbulkan konflik dengan penguasa jika mereka dianggap menyimpang dari ajaran Islam atau bertindak tidak adil. Para syekh yang memiliki pengaruh besar dapat mengkritik penguasa dan bahkan memobilisasi pengikut untuk menentang kebijakan tertentu.

Periode pertengahan dan akhir sejarah Islam, tarekat-tarekat sufi menjadi kekuatan sosial politik yang signifikan. Mereka sering kali berperan penting dalam memberikan legitimasi spiritual bagi kekuasaan dinasti-dinasti Islam, dan para syekh sufi memiliki pengaruh politik yang luas melalui jaringan pengikut mereka. Selain itu, dalam konteks tertentu, tasawuf juga menjadi basis ideologis dan organisasional untuk perlawanan terhadap penjajahan atau ketidakadilan. Pada saat yang sama, potensi mereka untuk resistensi juga nyata; tasawuf menjadi basis ideologis dan organisasional untuk perlawanan terhadap penjajahan atau ketidakadilan, menunjukkan dualitas perannya. (Rahman, 2020) Dinamika interaksi antara tasawuf dan kekuasaan pada periode ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara spiritualitas dan politik dalam peradaban Islam.

#### 4. Tasawuf di Era Modern (Abad 19-sekarang)

Era modern membawa gelombang perubahan besar yang dipicu oleh modernisasi dan sekularisasi, yang secara signifikan memengaruhi praktik dan pengaruh tasawuf di berbagai belahan dunia Islam. Perubahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi dunia tasawuf, di antara perubahan akibat modernisasi tersebut adalah:

- a. Tantangan Sekularisasi: Proses sekularisasi, yaitu pemisahan antara agama dan ranah publik (termasuk politik, hukum, dan pendidikan), menantang peran tradisional agama dalam masyarakat. Tasawuf, yang sering kali memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial dan bahkan politik, harus beradaptasi dengan tatanan dunia yang semakin sekuler. Ini dapat menyebabkan marginalisasi pengaruh publik tarekat dan pergeseran fokus ke ranah spiritualitas individual. (Syakhrani & Nournaina, 2023)
- b. Dominasi Rasionalitas dan Ilmu Pengetahuan Modern: Munculnya ilmu pengetahuan modern dan rasionalitas sebagai cara utama untuk memahami dunia dapat merongrong otoritas klaim-klaim mistis dan pengalaman spiritual yang menjadi inti tasawuf. Praktik-praktik sufistik yang dianggap tidak rasional atau tidak dapat dibuktikan secara empiris mungkin menghadapi skeptisisme dan kritik.
- c. Pembentukan Negara-Bangsa Modern: Pembentukan negara-bangsa modern dengan sistem birokrasi, hukum positif, dan identitas nasional yang sekuler sering kali menggantikan peran tradisional otoritas-otoritas agama, termasuk para syekh sufi dan jaringan tarekat, dalam mengatur kehidupan sosial dan politik. (Ni'am, 2016)

Paradoksnya, di tengah gelombang modernisasi dan sekularisasi, tasawuf juga memainkan peran yang beragam dan terkadang kontradiktif dalam gerakan kebangkitan Islam (*Islamic revivalism*) dan politik kontemporer. Di antara peran yang juga membangun peradaban dunia Islam adalah:

- 1) Sumber Spiritual bagi Gerakan Modernis: Beberapa tokoh modernis Islam pada awal abad ke-20, yang berusaha mereformasi pemikiran dan praktik Islam agar sesuai dengan tantangan modern, memiliki latar belakang sufistik atau terinspirasi oleh etika spiritual tasawuf. (M.A, 2013) Mereka melihat tasawuf sebagai sumber kekuatan moral dan spiritual untuk membangkitkan umat Islam.
- 2) Alternatif terhadap Ideologi Radikal: Dalam beberapa konteks, tasawuf dipandang sebagai alternatif yang lebih moderat dan toleran terhadap interpretasi Islam yang radikal dan puritan. Ajaran-ajaran tentang cinta kasih universal, toleransi, dan pentingnya dimensi batin agama dalam tasawuf dapat menjadi penyeimbang terhadap ideologi-ideologi ekstremis. (Ni'am, 2016)
- 3) Keterlibatan dalam Politik Praktis: Di beberapa negara, tarekat-tarekat sufi dan para pemimpinnya terlibat langsung dalam politik praktis, baik melalui pembentukan partai politik, dukungan terhadap kandidat tertentu, atau partisipasi dalam proses demokrasi. Motivasi mereka bisa beragam, mulai dari upaya untuk mempertahankan

pengaruh tradisional hingga mempromosikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik.(Putra, 2017)

- 4) Basis Mobilisasi Sosial dan Politik: Jaringan luas pengikut tarekat masih dapat menjadi basis mobilisasi sosial dan politik yang efektif. Para syekh atau *mursyid* yang memiliki karisma dan pengaruh dapat menggerakkan pengikut mereka untuk mendukung agenda politik tertentu.(Putra, 2017)

Tasawuf di era modern menghadapi tantangan signifikan dari modernisasi dan sekularisasi yang mengubah lanskap sosial dan politik. Namun, tasawuf juga menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ia memainkan peran yang kompleks dan beragam dalam gerakan kebangkitan Islam dan politik kontemporer, terkadang sebagai sumber inspirasi, alternatif moderat, atau bahkan aktor politik langsung. Transformasi tasawuf dalam konteks negara-bangsa modern mencakup reformulasi ajaran, adopsi bentuk organisasi modern, fokus pada pendidikan dan kegiatan sosial, serta munculnya tasawuf sebagai spiritualitas individual dan basis dialog antaragama. Dinamika ini menunjukkan bahwa tasawuf terus menjadi kekuatan yang relevan dan berkembang dalam dunia modern.

##### 5. Tasawuf di Indonesia

Tarekat mulai berkembang dan mulai mempunyai pengaruh besar di Indonesia pada abad ke-6 dan ke-7 H. Sejak masuknya Islam, bangsa Indonesia telah mengenal ahli fiqh (fuqaha'), ahli teologi (mutakallimun) dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata tarekat berperan menjadi pemain utama dan penentu gerakan sosial-politik dan ekonomi Nusantara. Sejarah menjadi saksi bahwa perlawanan bersenjata terhadap penjajah, kebanyakan telah digerakkan oleh para tokoh tarekat. Pembebasan Sunda Kelapa dari penjajah Portugis yang dipimpin oleh Sunan Gunungjati atau Syarif Hidayatullah bersama Fatahillah pada tanggal 22 Juni 1527, telah menjadi bukti sejarah.(Ni'am, 2016)

Dari abad ke-17 M. hingga abad ke-19 M., gerakan tarekat di Indonesia menampakkan partisipasinya membela kepentingan rakyat. Semula dengan pondok pesantren para guru tarekat bertindak sebagai educator. Tetapi dengan adanya perubahan tatanan politik yang menindas rakyat, pondok pesantren tidak hanya dijadikan area pembinaan spiritual dan agama semata, melainkan juga menanamkan kesadaran cinta tanah air, bangsa, dan agama. Gerakan anti penjajah menjadi bagian dari ajaran tarekat, dan perang melawan penjajah adalah suci dan termasuk jihad fi sabilillah. Sangat nyata jika pada abad ke-19 banyak bermunculan protes-protes sosial politik yang dipimpin

ulama' sufi, seperti protes sosial di Pekalongan (1850) yang dipimpin oleh Kyai Rofi'i. Perlawanan bersenjata terhadap Belanda di Cilegon yang terkenal dengan gerakan protes Cilegon (1883), yang dipimpin oleh guru tarekat Haji Warsyid. (Ni'am, 2016)

Dalam konteks modern (pasca kemerdekaan), tarekat sebagai organisasi gerakan maupun ajarannya masih menjadi daya tarik tersendiri dalam dinamika sosial-politik di negeri ini. Hal ini dapat disaksikan melalui dinamika sejarah gerakan tarekat di Indonesia. Mukhtar NU ke-26 di Semarang misalnya, pada Juni 1979 telah membentuk Jam'iyah Ahl Tarekat al-Mu'tabarrah al-Nahdliyah, dengan Surat Keputusan PB Syuriah NU No. 137/Syur.PB/V/1980, yang dipimpin oleh K.H. Idham Khalid dan K.H. Arwani. Di dalam organisasi tarekat ini, sebagian jamaah dan tokohnya ada yang masuk ke dalam Golongan Karya (Golkar) seperti K.H. Mustain Ramli, dan sebagian lainnya tidak setuju dengan bergabungnya tarekat ini ke dalam Golkar. Sebab bagi yang tidak setuju, mereka akan curiga terhadap kepentingan masing-masing jamaah dan tokohnya tersebut, sehingga terjadilah konflik (perpecahan) di kalangan jamaah tarekat tersebut. Kondisi ini akan berpengaruh kepada pengikut/jamaah tarekat yang memiliki ciri patuh dan taat terhadap seorang tokoh tarekat. (Ni'am, 2016)

Di era kontemporer pasca-reformasi, peran politik tasawuf di Indonesia semakin kompleks. Tarekat tidak lagi hanya menjadi basis perlawanan, tetapi juga menjadi aktor penting dalam diskursus demokrasi dan moderasi beragama. Melalui organisasi seperti JATMAN, para pemimpin sufi (*mursyid*) seringkali menjadi figur penyejuk dalam kontestasi politik dan garda depan dalam mempromosikan Islam *Wasathiyah* (Islam Moderat) untuk melawan narasi ekstremisme. Keterlibatan tokoh sufi kharismatik dalam forum-forum kebangsaan dan kedekatannya dengan elite politik menunjukkan transformasi peran tasawuf dari resistensi menjadi mitra strategis negara dalam menjaga keutuhan sosial dan ideologi Pancasila.

## **Kesimpulan**

Konteks politik pada masa awal Islam secara langsung memengaruhi kemunculan dan perkembangan awal tasawuf sebagai sebuah respons etis dan spiritual. Perkembangan awal tasawuf, yang ditandai dengan praktik zuhud (asketisme), muncul sebagai reaksi terhadap dinamika politik pasca-Khulafa Rasyidin yang diwarnai perebutan kekuasaan, perselisihan internal, dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik. Kondisi politik yang tidak stabil dan potensi ketidakadilan mendorong sebagian umat Islam untuk mengambil jarak dari hiruk-pikuk kekuasaan dan fokus pada penyucian jiwa, menjadikan tasawuf pada

awalnya sebagai gerakan moral untuk menjaga spiritualitas di tengah realitas politik yang dianggap koruptif.

Ajaran-ajaran tasawuf diinterpretasikan dan digunakan secara beragam, menunjukkan sifatnya yang fleksibel. Di satu sisi, konsep zuhud dan keadilan menjadi landasan kritik moral dan perlawanan terhadap penguasa yang zalim, seperti terbukti dalam gerakan anti-penjajahan di Indonesia. Di sisi lain, konsep kepatuhan mutlak kepada seorang *mursyid* menciptakan solidaritas sosial yang kuat, yang bisa dimobilisasi untuk mendukung atau melegitimasi penguasa yang dianggap adil, di mana para syekh sufi berperan sebagai penasihat dan penjaga harmoni sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tasawuf bukanlah entitas apolitis, melainkan sebuah kekuatan sosial-spiritual yang secara aktif bernegosiasi dengan kekuasaan, terkadang sebagai mitra legitimator, dan di saat lain sebagai oposisi moral. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa untuk memahami lanskap politik dunia Muslim kontemporer, analisis tidak cukup hanya berfokus pada partai politik atau gerakan Islam formal. Peran jaringan sufi yang subtil namun berpengaruh harus diperhitungkan sebagai aktor kunci dalam membentuk opini publik, mempromosikan moderasi, dan menjaga stabilitas sosial. Pemahaman ini penting bagi akademisi maupun pembuat kebijakan dalam memetakan kekuatan masyarakat sipil berbasis agama.

## Referensi

- M.A, P. D. A. A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media.
- Ni'am, S. (2016). Tasawuf di Tengah Perubahan Sosial (Studi tentang Peran Tarekat dalam Dinamika Sosial-Politik di Indonesia). *Harmoni*, 15(2), Article 2.
- Putra, A. E. (2017). Tasawuf dan Perubahan Sosial-Politik (Suatu Pengantar Awal). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(1), 62–72. <https://doi.org/10.24042/tps.v8i1.1544>
- Rahman, F. (2020). *Islam*. University of Chicago Press.
- Riyadi, A. (2014). Tarekat Sebagai Organisasi Tasawuf (Melacak Peran Tarekat Dalam Perkembangan Dakwah Islamiyah). *At-Taqaddum*, 359–385. <https://doi.org/10.21580/at.v6i2.716>
- Sitika, A. J., Diana, S. D. S., Muntahanah, H. A., Fauziah, A., & Mulyani, D. T. (2024). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Taswuf dalam Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 22(03), Article 03. <https://doi.org/10.36835/jipi.v24i03.4251>

- Syakhrani, A. W., & Nournaina, N. (2023). Sejarah Munculnya Tasawuf. *Cross-Border*, 6(1), Article 1.
- Ulumuddin, M. I., Nurcholisho, L. R., & Shiddiq, N. (2020). PENAFSIRAN AL-JILAINI TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURÁN TENTANG PUTUS ASA. *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)*, 2(2), Article 2.
- Zebua, A. T., Az-Zahra, A. S., & Ajmain, M. (2025). Pengertian Tasawuf dan Sejarah Kemunculannya. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(3), Article 3.